

MODEL *M-GOVERNMENT* DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI POLISI KARIMUN DI POLRES KABUPATEN KARIMUN

Oleh
Deyvia Ashya
NIM. 180563201009

Abstrak

Model pelayanan *M-Government* yang berbasis Teknologi Informasi penerapan *e-government* dengan menggunakan perangkat *Mobile*. Salah satu institusi yang menerapkan pelayanan dengan model *m-government* dalam pelayanan berupa aplikasi yaitu Kepolisian Resor (Polres) Karimun. Model *m-government* dalam pelayanan yang dilakukan yaitu model pelayanan berbasis *android* melalui aplikasi bernama “SIPOKA” (Aplikasi Polisi Karimun) yang dapat diunduh di *Play store* di *smarthphone*. Namun, dalam penerapannya menunjukkan masih ada kendala yang dihadapi yaitu masalah kesiapan masyarakat yang belum memumpuni dalam penggunaan Teknologi Informasi dan terbatasnya akses internet di beberapa daerah tertentu di Kabupaten Karimun. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan model *m-government* dalam pelayanan melalui Aplikasi Polisi Karimun di Polres Karimun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 8 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator dalam penelitian ini yaitu *Information models* (Model Informasi) yaitu informasi belum sepenuhnya terlaksana secara merata karena informasi hanya diberikan melalui media social dan sosialisasi lapangan belum terlaksana. *Communication models* (Model Komunikasi), yaitu belum sepenuhnya terlaksana kepada masyarakat yang Gaptex. *Transaction models* (Model Transaksi), yaitu dalam Aplikasi Polisi Karimun tidak terlaksana karena didalam Aplikasi Polisi Karimun tidak menyediakan tempat transaksi secara online. *M-democracy and participation* (Model Demokrasi dan Partisipasi) yaitu dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bagian Partisipasi dalam Aplikasi Polisi Karimun sudah terlaksana dikarenakan Aplikasi Polisi Karimun sudah melakukan kerjasama dengan beberapa Instansi terkait. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Model *M-Government* Dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Polisi Karimun Di Polres Kabupaten Karimun belum terlaksana sepenuhnya karena meskipun Aplikasi ini sudah ada tetapi masyarakat tetap harus datang lagi ke Polres Karimun untuk menyelesaikan tahap akhir dari pelayanan. Direkomendasikan kepada Polres Karimun untuk membuat SOP Aplikasi Polisi Karimun, serta memberikan sosialisasi secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Karimun

Kata Kunci: Model *M-Government*, Pelayanan Publik, Aplikasi Polisi Karimun

*M-GOVERNMENT MODEL IN PUBLIC SERVICES THROUGH THE KARIMUN
POLICE APPLICATION IN POLRES KARIMUN REGENCY*

Deyvia Ashya
NIM. 180563201009

Abstrack

The M-Government service model based on Information Technology is the application of e-government using mobile devices. One of the institutions that implement services with the m-government model in service in the form of applications is the Karimun Resort Police (Polres). The m-government model in the services provided is an Android-based service model through an application called "SIPOKA" (Karimun Police Application). However, in its implementation, it shows that there are still obstacles faced, namely the problem of community readiness that has not been qualified in the use of Information Technology and limited internet access in certain areas in Karimun Regency. through the Karimun Police Application at the Karimun Police Station. The method used in this study is a qualitative descriptive method with 8 informants and using data collection techniques and tools in the form of interviews, documentation and observation. The results of the research in this study, namely the overall M-Government Model in Public Services Through the Karimun Police Application at the Karimun District Police have not been fully implemented because even though this application already exists, the community still has to come again to the Karimun Police Station to complete the final stage of service. It can be seen from the results of this study that Information models. Communication models, which have not been fully implemented for the Gapték community. Transaction models, in this study show that Transaction models in the Karimun Police Application are not implemented because the Karimun Police Application does not provide an online transaction place. M-democracy and participation. In this study, it shows that the Participation section in the Karimun Police Application has been carried out It is recommended for the Karimun Police to make the Karimun Police Application SOP.

Keywords: M-Government Model, Public Service, Karimun Police Application